



Pendaftar Membeludak, Sekolah Kewalahan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) menetapkan Peraturan Menteri No.9/2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 28 Mei 2025. TKA akan menggantikan sistem ujian nasional dan kesetaraan.

IMPLEMENTASI

Peserta	Mata pelajaran yang diuji	Waktu Pelaksanaan Ujian
▶ Siswa jalur formal ▶ Kelas VI SD/ sederajat ▶ Kelas IX SMP/ sederajat ▶ XII SMA/ sederajat	a. Bahasa Indonesia b. Matematika c. Bahasa Inggris d. Mata pelajaran pilihan (siswa dapat memilih dua)	▶ SMA/ sederajat dan Paket C
▶ Siswa nonformal- peserta ▶ Paket A (SD/ sederajat) ▶ Paket B (SMP/ sederajat) ▶ Paket C (SMA/ sederajat)		▶ SD/ sederajat, Paket A, SMP/ sederajat, Paket B
▶ Siswa informal pada sekolah rumah/ homeschooling.	Keterangan: Bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan hanya bagi peserta Paket C atau SMA/ sederajat.	▶ November 2025 ▶ Maret 2026



Tujuan TKA

- ▶ Menjamin pemenuhan akses siswa pendidikan nonformal dan informal terhadap penyeteraan hasil belajar.
- ▶ Mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas.

Manfaat TKA

- ▶ Meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan standarisasi kualitas siswa dan lembaga pendidikan.
- ▶ Memberikan kesetaraan bagi siswa pendidikan di luar jalur formal menunjukkan capaian akademiknya.
- ▶ Sertifikat hasil TKA dapat digunakan sebagai acuan/ keperluan untuk melanjutkan jenjang studi.

Jumlah Satuan Pendidikan di Indonesia

(Data Kemdikdasmen per 9 Juni 2025)

▶ Formal	282.697
▶ Nonformal	24.603

BANTUL—Orang tua calon siswa masih mendatangi sekolah untuk pengajuan akun dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) tingkat SMP di Kabupaten Bantul.

Kiki Luqman, Andreas Yuda Pramono, & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com

▶ Wali murid mengaku tidak mengalami kesulitan saat mendaftarkan anaknya di SMPN 1 Sanden.

▶ SMPN 1 Sanden juga menyediakan fasilitas untuk para wali murid yang tidak memiliki akses Internet.

Padahal, pengajuan akun bisa dilakukan di mana saja, dengan syarat ada fasilitas Internet. Di SMPN 1 Banguntapan pendaftar dan wali murid membeludak, pihak sekolah mengonfirmasi bahwa sejak pembukaan pada Rabu (18/6), hingga pukul 14.00 WIB sudah lebih 300 berkas yang terkumpul.

Kepala SMPN 1 Banguntapan, Harjana, menyampaikan pada tahun ini sekolah itu membuka kuota pendaftaran sebanyak 256 siswa. "Proses hari pertama membeludak, karena pengurusan dan pengajuan akun itu kan bisa di mana saja jadi meski tidak memilih di sini tapi untuk pengajuan akun boleh di sini juga, akhirnya menumpuk. Kami sampai kewalahan sendiri ngurusnya," ungkapnya.

Pendaftar Membeludak...

"Untuk rincian perjalur domisili radius 5 persen atau 13 anak, domisili wilayah 35 persen afirmasi 20 persen bareng dengan disabilitas, prestasi 35 persen, mutasi 5 persen," kata Harjana Rabu (18/6).

Kepala SMPN 1, Sanden Windarti, mengaku pada tahun ini sekolahnya membuka kuota sebanyak 160 siswa. Dari angka itu dibagi menjadi beberapa jenis jalur pendaftaran. "Untuk yang afirmasi dan disabilitas 25 persen atau 32 anak, domisili wilayah 35 persen. Lalu ada radius 5 persen, mutasi 5 persen, prestasi 35 persen atau 56 anak," ucap Windarti. "Sebelumnya kami juga sudah sosialisasi ke 50 SD yang berada di wilayah ini," jelasnya.

Windarti mengaku untuk kecurangan di sekolah itu sudah tidak pernah terjadi. Pasalnya kecurangan terakhir pada dua tahun lalu. Menurutnya, kecurangan ditemukan di jalur disabilitas. "Kecurangan di sini sudah tidak pernah ada lagi, kalau dulu, dua tahun yang lalu, ada beberapa murid yang curang dengan membawa surat disabilitas tapi sekarang sudah tidak pernah ada. Jadi, mereka dapat surat disabilitas yang akhirnya bisa lolos masuk ke sekolah ini, karena disabilitas pasti langsung diterima kan, setelah lolos ternyata anaknya normal." "Tapi sekarang sudah tidak bisa, karena surat rekomendasi atau identifikasi disabilitas wajib dari RSUD pemerintah yang artinya tidak bisa diakali lagi," jelasnya.

Selain itu, SMPN 1 Sanden juga menyediakan fasilitas untuk para wali murid yang tidak memiliki akses Internet. Salah satu wali murid Dariyanti yang mendampingi anaknya mengaku tidak mengalami kesulitan saat mendaftarkan anaknya di SMPN 1 Sanden. Ia sudah dibantu oleh pihak SD terkait dengan pengajuan akun dan akhirnya hari ini hanya tinggal menyerahkan berkas. "Enggak ada kesulitan, karena sudah dibantu sama SD anak saya. Kalau tidak dibantu mungkin saya kesulitan di pembuatan akun, aktivasi token dan lainnya. Beruntung sekolah anak saya sudah bantu duluan, hari ini [kemarin] cuma ngumpulin

berkas aja," ucapnya.

Jalur Domisili

Adapun, Pemkot Jogja menerapkan SPMB untuk jenjang SMP khusus jalur domisili Kemantren Umbulharjo. Proses SPMB tahap khusus ini dibuka untuk warga Umbulharjo yang mendaftar di SMPN 10 Jogja. Tahap khusus itu dibuka karena pertimbangan luasan wilayah dan jumlah siswa di Kemantren Umbulharjo padahal hanya ada satu SMP Negeri di wilayah itu.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, mengatakan SPMB jalur domisili khusus di Umbulharjo itu untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Mengingat luas wilayah Kemantren Umbulharjo hampir 1/3 dari luas Kota Jogja dan sekolah SMP negeri di wilayah itu hanya ada satu yaitu SMP Negeri 10. "Makanya kami membuka akses awal bagi masyarakat Umbulharjo untuk jalur domisili daerah. [Kuota] Dua puluh persen awal digunakan untuk masyarakat Umbulharjo," kata Budi dikutip, Rabu.

Ia menjelaskan SPMB SMP negeri jalur domisili daerah memiliki kuota daya tampung 40%. Khusus di SMPN 10 Jogja, kuota jalur domisili daerah sebanyak 20% awal untuk seleksi tahap khusus Kemantren Umbulharjo. Sedangkan sisa kuota 20% untuk seleksi tahap 14 kemantren di Kota Jogja. Adapun daya tampung SMPN 10 Jogja jalur domisili daerah sebanyak 91 kursi. "SPMB tahun ini tidak banyak perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang ada perubahan kuota dan tata cara secara teknis. Prinsip kami tetap mengakomodir anak-anak yang sangat dekat dengan sekolah dan afirmasi bagi masyarakat yang kurang mampu dan disabilitas."

Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Disdikpora Kota Jogja, Mannarima, menyatakan setelah melalui pendataan, di Kemantren Umbulharjo paling banyak jumlah siswanya. Jumlah SMP negeri di Kemantren Umbulharjo hanya satu dan jarak dengan SMP negeri lainnya relatif jauh.

Dengan kondisi itu menurutnya masyarakat Umbulharjo akan kesulitan untuk SPMB jalur radius. Oleh sebab itu SPMB jenjang SMP jalur domisili daerah dibuka tahap khusus Kemantren Umbulharjo.

Dia mengingatkan seleksi tahap khusus Umbulharjo bersamaan dengan seleksi jalur radius. Jadi masyarakat Umbulharjo harus memilih, jika peluang bisa masuk domisili radius, maka pilih jalur domisil radius. Kalau peluang terlalu jauh maka ikut yang tahap khusus Umbulharjo.

Layanan Informasi

Sementara itu, di SMPN 4 Depok, Sleman, membuka layanan informasi terkait dengan SPMB hingga 1 Juli 2025. Ketua Panitia SPMB SMPN 4 Depok, Berliyan Arya Ferismanda, mengatakan syarat pendaftaran SPMB SMPN 4 Depok sama seperti sekolah negeri lain di Kabupaten Sleman. Tidak ada syarat khusus. SMPN 4 Depok juga tidak membuka kelas khusus olahraga (KKO).

Pukul 11.00 WIB, layanan informasi SPMB SMPN 4 Depok dipenuhi beberapa orang tua yang bertanya bermacam hal.

Arya mengaku tidak ada kendala selama penyelenggaraan SPMB tahun ke tahun. Ihwal praktik titip kartu keluarga (KK) pun tidak ada. Persyaratan ketat untuk KK mencegah terjadinya kecurangan. Kata dia, penerbitan KK minimal setahun. Apabila ada pembaruan KK, pihak keluarga calon siswa harus menyerahkan lampiran KK tahun sebelumnya.

Mengenai jalur domisili radius, 300 meter, Arya menyampaikan panitia juga mengukut melalui *google maps* dan mendatangi langsung rumah calon siswa guna memastikan kebenaran titik.

"Kendala tidak ada. Paling ya jalur mutasi yang kadang syaratnya kurang dipahami orang tua." Menurutnya, orang tua yang hanya pindah kantor tetapi masih dalam satu kabupaten yang sama tidak bisa menggunakan jalur mutasi. Adapun data tampung kelas reguler SMPN 4 Depok ada empat rombongan belajar dengan 128 kursi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005